

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Transisi di negeri ini dalam banyak hal justru memperkuat struktur elite tradisional daripada menyingkirkan mereka. Bahkan, kebanyakan dari mereka berhasil mengkonversikan otoritas itu untuk melakukan perlibatan politik (political engagement) secara efektif di wilayah publik. Ortodoksi agama dan adat adalah dua sumber otoritas tradisional yang kerap kali dipakai untuk menghidupkan peran publik elite tradisional di wilayah masyarakat dan Negara. Ajaran demokrasi mendiktekan pemisahan yurisdiksi otoritas Negara dan masyarakat. Tiadanya prinsip-prinsip Negara modern yang berbasis pada ajaran demokrasi mengakibatkan kaburnya batas wilayah publik dan privat. Selama hampir sepuluh tahun untuk melampaui batas otoritas atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh otoritas masing-masing.
2. Menurut Akbar Tandung, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang

Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

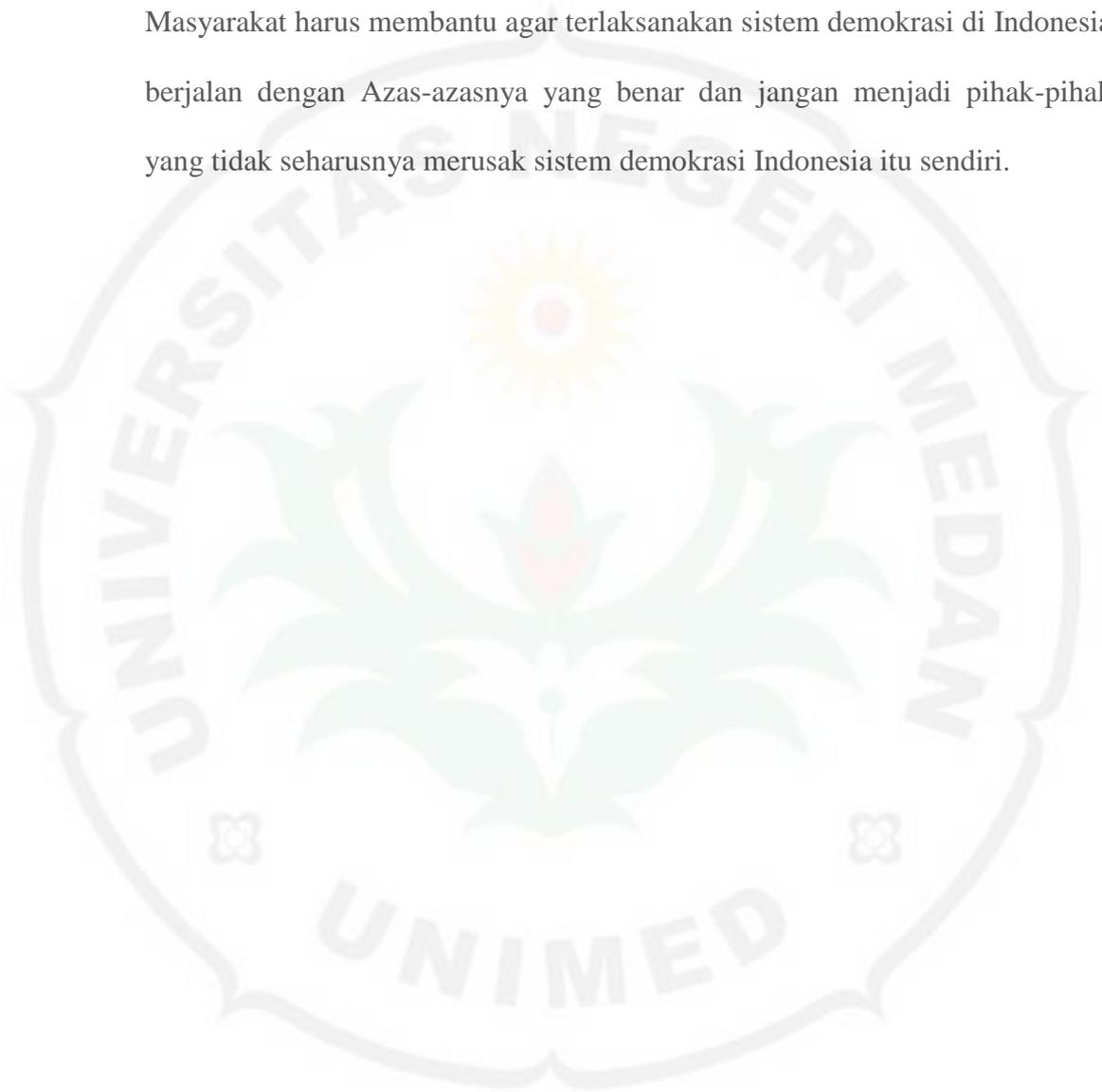
3. Menurut Akbar Konsep Demokrasi telah dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemajemukan politik dan munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar Negara berimbas bagi Indonesia, telah menjadi ciri kepolitikan Indonesia mutakhir. Bila di masa lalu sentralisasi kekuasaan sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan, sekarang tidak lagi. Fenomena strong state sekarang digantikan oleh strong society, dan negara yang dahulu diwarnai oleh strong leader pun dewasa ini telah digeser oleh weak leader. Indonesia harus secara terus menerus membangun budaya demokrasi melalui pendidikan politik yang baik dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi ke tengah-tengah masyarakat, juga harus menmbangun suatu demokrasi yang paling workable diterapkan di Indonesia. Artinya, demokrasi yang dapat berfungsi dengan baik, yang menjamin stabilitas politik terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa, memungkinkan pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara maksimal untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal kepadamasyarakat, dan mengayomi rakyat.
4. Menurut Akbar Tandjung Secara umum sistem demokrasi Indonesia yang berjalan melalui pemilu telah berjalan lancar dan aman. Kehadiran partai-partai dalam jumlah yang sangat besar dengan antusiasme yang kelewat tinggi telah memberi warna dan aroma tersendiri dalam pemilu ini. Kinerja partai masih bersifat euphoria sehingga kampanye pemilu yang mestinya mejadi media sosialisasi dan pendidikan politik dalam rangka substansiasi nilai-nilai demokrasi, ternyata sekedar menjadi medan show of force dan hura-hura

semata. Tetapi bagaimanapun juga pemilu sistem multipartai ini merupakan langkah awal yang memiliki makna signifikan untuk mengisi transisi demokrasi ini. Walau adanya tidak tegaknya Rule of The Game, kita menghadapi banyak sekali aksi-aksi politik yang melawan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan (rule of the game) yang berlaku, ironisnya adalah tindakan-tindakan ini yang sebagian akan dikemukakan di bawah justru dilakukan oleh sementara partai politik peserta pemilu sendiri di depan hidung PANWASLU yang nota bene memegang otoritas pengawasan, juga KPU dan Komite Pengawas Pemilu juga. kinerja KPU dengan penuh keprihatinan yang mendalam, KPU bukan hanya terkesan tidak netral dan independen, melainkan juga terkesan tidak professional, cara kerjanya kurang sistematis, tidak ada pilihan prioritas, kurang efektif dan efisien, dan banyak yang sulit dipahami. Masyarakat misalnya, bertanya-tanya mengapa perhitungan begitu berjalan lamban? Lebih daripada itu untuk keperluan apa perhitungan mesti dilakukan di tingkat nasional, sementara semua orang tahu bahwa dalam pemilu 1999 ini sistem perhitungan suara dan pembagian kursi adalah berbasis di Daerah Tingkat I. Dan oleh karena besarnya bilangan pembagi masing-masing Daerah Tingkat I berbeda-beda sesuai dengan jatah kursi yang tersedia untuk suatu daerah, lalu untuk apa dan apa relevansinya memprioritaskan pengumpul dan perhitungan suara di tingkat nasional? Mengapa perhitungan suara tidak diprioritaskan di Daerah Tingkat I saja?.

## B. Saran

1. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia ini harus benar-benar berjalan Luber dan jurdil, tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu partai pada saat Pemilu, dan tidak adanya Money Politik. Karena Money politik itu berarti tidak demokrasi, hak untuk memberikan pendapat maupun hak suara tidak dari hati nurani tetapi melainkan dari uang sogokan.
2. Pelaksanaan pemilu yang merupakan salah satu bentuk Demokrasi, harus berjalan sesuai konsep-konsep demokrasi itu sendiri. Konsep-konsep demokrasi harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Agar tidak adanya masyarakat yang protes dan melakukan hal-hal yang tidak benar seperti unjuk rasa, pembakaran alat-alat peraga kampanye, ancaman-ancaman bagi kader-kader partai-partai politik itu sendiri.
3. Pemerintah pusat dan daerah harus tegas dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Harus tegas mengambil sikap dan menjadi penengah saat berlangsungnya pesta demokrasi yaitu pemilu legislative bahkan pemilu presiden harus juga menjadi sikap independen tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik. Baik lembaga-lembaga pemerintahan baik dari daerah maupun pusat harus bersikap netral. Bahkan penyelenggara pemilu, pemantau pemilu dan komite pengawas pemilu yang notabene harus bersikap netral tetap harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku jangan melakukan hal kecurangan.
4. Bagi masyarakat Indonesia yang juga melaksanakan sistem demokrasi juga harus jujur dan adil. Laksanakan hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia dengan baik dan besar. Ketika memberikan hak pendapat dan suara dengan

hati nurani sendiri dan tidak terpengaruh hanya dengan selembar uang. Masyarakat harus membantu agar terlaksanakan sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan Azas-azasnya yang benar dan jangan menjadi pihak-pihak yang tidak seharusnya merusak sistem demokrasi Indonesia itu sendiri.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY